**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENGATASI PERMASALAH PENGIRIMAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) KE ARAB SAUDI**

**TAHUN 2015- 2018**

**Elhen Dwi Cahyati**

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Bisnis & Humaniora

Universitas Teknologi Yogyakarta

Email: elhen34@gmail.com

# ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana tanggung jawab pemerintah Indonesia selaku negara asal memberikan perlindungan terhadap warga negaranya dari permasalahan kekerasan yang di lakukan oleh Arab Saudi. Dalam menganalisis permasalahan Pekerja Migran Indonesia (PMI), penelitian ini menggunakan teori migrasi internasional dan konsep *Responsibility to Protect* (R2P) sebagai alat bantu untuk menganalisis penulisan ini. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang digunakan. Melalui Konsep *Responsibility to Protect* (R2P) penulis melihat bahwa pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk mencegah dan melindungi PMI melalui sebuah peraturan atau kebijakan yaitu, diplomatik, Moratorium, MoU dan SPSK.

**Kata Kunci**: Indonesia, Arab Saudi, PMI, R2P, Migrasi.

***THE RESPONSIBILITY OF THE INDONESIAN GOVERNMENT IN OVERCOMING THE PROBLEM OF DELIVERING INDONESIAN MIGRANT WORKERS (PMI) TO SAUDI ARABIA 2015-2018***

**Elhen Dwi Cahyati**

*International Relations Study Program*

*Faculty of Business & Humanities*

*University of Technology Yogyakarta*

*Email:* *elhen34@gmail.com*

# *ABSTRACT*

*This study aims to analyze how the responsibility of the Indonesian government as the country of origin is to provide protection to its citizens from the problems of violence committed by Saudi Arabia. In analyzing the problems of Indonesian Migrant Workers (PMI), this study uses international migration theory and the concept of Responsibility to Protect (R2P) as tools to analyze this writing. Qualitative research is the type of research used. Through the concept of Responsibility to Protect (R2P), the author sees that the government has made several efforts to prevent and protect PMI through a regulation or policy, namely diplomatic, moratorium, MoU and SPSK.*

***Keywords****: Indonesia, Saudi Arabia, PMI, R2P, Migration*